

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis penyebab krisis utang Sri Lanka dalam kerja sama proyek pembangunan Pelabuhan Hambantota. Hasil analisis menemukan bahwa krisis utang Sri Lanka disebabkan oleh tindakan tak bertanggung jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Tiongkok sebagai kreditur maupun Sri Lanka sebagai debitur. Tiongkok telah memberikan pinjaman secara agresif tanpa memperhatikan kelayakan kredit Sri Lanka. Idealnya, kreditur menghentikan pinjaman ketika kelayakan kredit debiturnya semakin rendah dan bahkan tidak mampu membayar utang, atau mengajukan syarat regulasi yang harus dilakukan debitur, tetapi Tiongkok tidak.

Ada empat tindakan tak bertanggung jawab yang dilakukan Sri Lanka. Pertama, menghindari ketentuan yang baginya memberatkan, meskipun sebenarnya persyaratan tersebut adalah untuk kebaikan Sri Lanka itu sendiri, sehingga pada akhirnya mangkir dan mencari kreditur yang bersedia memberikan pinjaman tanpa peduli permasalahan domestiknya, yaitu Tiongkok, meskipun suku bunga yang ditetapkan jauh lebih tinggi daripada pihak lain. Tetapi, tingginya bunga mengakibatkan beban utang Sri Lanka semakin berat. Kedua, ketidakmampuan Pemerintah Sri Lanka dalam menangani defisit anggaran berkepanjangan sehingga mengakibatkan kelemahan finansial. Hal ini berkaitan dengan jumlah pendapatan negara dari pengumpulan pajak yang sangat sedikit akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak penduduk Sri Lanka, pembaruan kebijakan perpajakan yang justru

mengakibatkan pendapatan pajak menurun. Tak hanya itu, melesetnya perkiraan Sri Lanka sebelum pembangunan proyek, yaitu proyeksi atas keberhasilan Pelabuhan Hambantota yang akan mampu menghasilkan pendapatan pajak yang tinggi, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terwujud.

Ketiga, ketidakmampuan Pemerintah Sri Lanka membuat kebijakan yang tepat dalam menyikapi situasi utang. Pada periode 2005-2015, Presiden Rajapaksa melangsungkan beberapa megaprojek pembangunan dalam waktu berdekatan dan semuanya berasal dari pinjaman Tiongkok, akibatnya beban utang yang ditinggalkannya sangat besar, sehingga Presiden Sirisena tidak mampu lepas dari cengkraman Tiongkok karena dependensi Sri Lanka terhadap Tiongkok sudah terlanjur tinggi, sehingga meskipun Sirisena telah melakukan berbagai upaya, pada akhirnya kebijakan yang diciptakan itu menuruti keinginan Tiongkok.

Keempat, minimnya transparansi dan tingginya korupsi. Minimnya transparansi berarti tingkat kerahasiaan atau *secrecy* tinggi. Hal ini mengakibatkan pihak oposisi hanya memiliki informasi yang minimal saat mereka memasuki ranah pemerintahan. Korupsi merupakan permasalahan yang tak kunjung selesai di Sri Lanka dan sepanjang sejarahnya, Pemerintah Sri Lanka tidak pernah mampu berhasil memusnahkan korupsi akibat minimnya transparansi. Bahkan ketika pemimpin membuat atau memperbarui kebijakan demi menekan angka korupsi, tetap saja tidak efektif akibat budaya politik yang telah mengakar. Proyek infrastruktur berskala besar pun seringkali dibarengi oleh tingginya korupsi. Hal tersebut memberikan peluang kepada Tiongkok untuk mendapatkan *power* yang lebih besar lagi di Sri Lanka. Semua tindakan-tindakan tak bertanggung jawab

tersebut mengakibatkan Sri Lanka tidak memiliki banyak pilihan ketika beban utang semakin berat dan akhirnya situasi krisis utang pun tak terelakkan.

5.2 Saran

Peneliti sudah menemukan penyebab terjadinya krisis utang Sri Lanka dalam kerja sama Pelabuhan Hambantota. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih mengeksplor dari sisi Tiongkok untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pola Tiongkok dalam memberikan pinjaman kepada negara berkembang yang pada akhirnya membawa keuntungan kepada negaranya saja, sementara negara penerima lebih banyak mengalami kerugian. Peneliti juga menyarankan untuk meneliti fenomena *debt trap diplomacy* yang telah ramai menjadi pembahasan terkait Tiongkok dan ketidakmampuan negara penerima melunasi utangnya.

